

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan berfokus pada peran kyai dalam pemilihan kepala desa. Dimana peran kyai ini menimbulkan pengaruh kepada masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan dari pengaruh kyai ini yaitu pembelahan suara kyai pada saat pemilihan kepala desa. Tinjauan teoritis dan empiris telah dilakukan dan penelitian ini didasari oleh beberapa asumsi. Ketika menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa Besito, para kyai diperebutkan oleh calon kepala desa. Kyai yang sudah mempunyai nama terkenal menjadi tujuan kandidat kepala desa dengan berkunjung ke rumah kyai guna mendapat restu dan dukungan. Bagi kyai yang belum terkenal di desa ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang paling berpengaruh. Dari sinilah pembelahan suara kyai dalam pemilihan kepala desa. Pertama, peran kyai di dalam masyarakat sebagai tokoh agama. Kedua, pengaruh kyai ketika menjelang pemilihan kepala desa.

Masyarakat Indonesia memiliki entitas sosial yang keberadaanya sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial. Entitas sosial yang dimaksud adalah kyai. Kyai adalah sebutan untuk yang dituakan atau dihormati baik karena menguasai ilmu agama (Islam). Dalam kehidupan masyarakat kyai mempunyai peranan dalam pembinaan mental-spiritual. Melalui dakwahnya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi upaya menangani berbagai penyakit mental yang timbul didalam masyarakat (Rozi, Saifudin, Rohmad, & Syarif, 2019). Dengan peran kyai yang sangat besar didalam masyarakat akan menimbulkan permasalahan baru yakni persaingan antar kyai. Pada mulanya, sesama kyai memiliki sudut pandang yang sama akan tetapi lama kelamaan cara berfikir kyai berubah karena era jaman tambah maju dan berkembang. Ilmu dan pengetahuan pun mengalami perubahan menjadi lebih baik dengan menyesuaikan

jaman. Persaingan kyai ini menjadi contoh nyata ketika ada kegiatan politik yaitu ajang pemilihan. Untuk memilih pemimpin di suatu negara atau birokrasi pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemilihan adalah pemilihan kepala desa (pilkades). Dengan demikian, keterlibatan kyai dalam politik kebangsaan sudah sepantasnya harus ditingkatkan lagi porsinya, supaya fungsi utama kyai sebagai pengayom umat dapat kembali dirasakan (Nofiaturrehman, 2014).

Persaingan antar kyai menimbulkan kelompok-kelompok kepentingan ikut bermain untuk meramaikan suasana di desa. Dampak lebih lanjut dari persaingan ini yaitu Pertama, kyai tidak lagi fokus untuk melaksanakan amanat serta mengajarkan ajaran Islam yang belum sesuai dengan kitab-kitab Allah SWT. Kedua, kedudukan kyai didalam masyarakat mulai terguncang oleh isu-isu politik. Ketiga, kyai yang condong ke arah salah satu calon kepala desa dan si calon kepala desa memenangkan persaingan politik mengakibatkan kyai ini tergabung dalam kelompok si calon pemenang pemilihan. Jika dampak ini terjadi maka akan timbul konflik yang berkepanjangan di desa secara turun-temurun. Sebaliknya, jika dampak ini tidak akan terjadi, jika kyai ini bersatu dan bergotong-royong untuk memajukan kemakmuran desa kedepannya. Mengarahkan dan membebaskan pilihan masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Dalam arti mengarahkan yaitu memberikan pandangan tentang kepemimpinan dan pemimpin yang pantas dijadikan panutan di desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi bahwasannya tokoh agama yang dimaksud adalah kyai. Peran seorang kyai diantaranya adalah sebagai pemimpin umat atau masyarakat sebagai pembimbing moral umat. Dalam pondok pesantren kyai memiliki posisi sentral. Karena disamping keberadaanya sebagai satu-satu figur yang disegani dan dihormati, kyai juga diyakini dapat memberikan barokah kepada santrinya pasalnya dianggap sebagai sosok suci yang dekat dengan Allah SWT. Peran kyai mutlak diperlukan karena figurnya yang sentral baik dalam pesantren maupun masyarakat. Tanpa campur tangan atau intervensi seorang kyai proses keberagaman maupun transformasi nilai dalam pesantren dan masyarakat itu menjadi kurang efektif.

Pengaruh kyai juga tidak semata-mata dalam masalah keagamaan, tetapi juga masalah-masalah sosial secara luas semakin memperkuat pengaruhnya dalam dunia politik. (Aji & Adnan, 2020). Kyai memperoleh kepercayaan besar dari masyarakat luas untuk berbagai masalah dan fenomena politik, kemudian pengaruh kyai tidak terbatas pada banyaknya jumlah pesantren dalam suatu wilayah, namun dengan banyak atau sedikitnya pondok pesantren tidak menjamin bahwa kyai mempunyai peran besar dalam kehidupan politik masyarakat. Posisi kyai yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat adalah suatu posisi yang strategis dalam menggerakkan umat pada pilihan-pilihan tertentu. Dalam konteks ini jelas kyai bisa disebut sebagai elit politik, dan dari sinilah sumber kekuatan kyai berasal (Noeh, 2014:19).

Peran Kiai dalam politik selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan, studi tentang Kiai tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor saja (Kiai sebagai pemuka/tokoh agama), melainkan Kiai mempunyai banyak wajah (*multy faces*) yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan Kiai dalam berpolitik. Keterlibatan para Kiai dalam proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing – masing (Subiyakto, 2011:41).

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Satu individu atau kelompok individu inilah yang sering disebut elite. Elite ini memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan orang lain (individu) dan keputusan kolektif. Dalam kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Putnam menggambarkannya dalam sebuah piramid, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*). Lapisan ini sebagian

besar terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan resmi utama, walaupun tidak selalu mereka. Lapisan kedua di bawahnya adalah kaum berpengaruh (*influentials*) yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan oleh pembuat keputusan itu. Lapisan kedua terdiri dari para birokrat, tuan tanah, industrialis, bankir, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi. Lapisan ketiga terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah, misalnya sebagai anggota partai, birokrat tingkat menengah, editor surat kabar atau para penulis. Lapisan ini disebut aktivis yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kaum berpengaruh. Lapisan keempat terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik. Mereka disebut publik peminat politik (*attentive public*) ini berbeda dengan sebagian besar warga negara akibat luar biasa besarnya perhatian yang mereka berikan terhadap masalah pemerintahan dan kemasyarakatan. Mereka ini mengetahui pemain terkemuka dalam permainan politik, sekali pun tanpa melihat "angka kemenangan" yang diperoleh masing-masing pemain, dan mereka (hanya) mendiskusikan jalannya permainan dan strateginya dan jarang sekali terjun ke lapangan. Lapisan kelima adalah kaum pemilih (*voters*). Kaum pemilih ini memiliki satu sumber politik kolektif penting, yaitu jumlahnya sangat besar, tetapi sebagai individu mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali. Lapisan keenam adalah yang dalam pengertian politik hanya menjadi objek politik, dan bukan aktor yaitu non-partisan. Mereka tidak berafiliasi dan tidak memiliki pengaruh politik (Chalik, 2017).

Kiai sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Kiai dengan massa yang sangat hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulung suara kemenangan untuk calon pemimpin daerah. Sebagai imbalan atas jerih payah Kiai, Pemimpin terpilih akan memberikan berbagai macam fasilitas, sehingga implikasi politik yang ada berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam iming-iming, tidaklah lagi otonom karena hak yang seharusnya lebih

banyak dimanfaatkan oleh rakyat sebagai cermin dari kedaulatan sudah teracuni berbagai kepentingan materi dan kekuasaan. Tarik menarik “kepentingan” antara kandidat dengan Kiai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Kiai sangat menentukan keberhasilan seorang calon kandidat. Kiai dengan karismanya mampu memobilisasi massa dalam rangka penggalangan massa untuk berkampanye.

Ketika Kiai masuk dalam sistem politik melalui partai politik, secara otomatis Kiai mendapat jatah untuk menjadi tim sukses atau juru kampanye calon yang didukung oleh parpol yang bersangkutan. Bermodal basis massa dan karisma, Kiai mampu memainkan peran penting dalam suksesi seorang calon Kepala Daerah atau Kepala Desa. Selain Kiai terjun langsung ke gelanggang politik, ada Kiai yang hanya menjadi partisipan atau hanya memberi restu kepada calon tertentu. Keadaan ini sebagai antisipasi perkembangan pesantren dan masa depan karir Kiai jika ternyata calon yang didukung kalah dalam pilkada. Kiai tidak terlibat dalam kegiatan politik secara langsung. Ia hanya menjadi pendukung di garis belakang. Artinya, tidak menjadi tim sukses atau juru kampanye calon tertentu. Keterlibatan Kiai dalam politik hanya sebatas pemberian restu kepada calon yang datang dan memohon restu ke pesantren. Lebih lanjut, pemberian restu tidak hanya diberikan kepada satu calon saja, melainkan ketika ada calon yang datang ke pesantren sang Kiai dengan rela memberi restu untuk maju dalam pemilihan umum, seperti contoh, calon kandidat yang berkontestasi dalam memperebutkan kursi sebagai Presiden Republik Indonesia pun mengunjungi tokoh agama dalam hal ini kyai yang terpandang, berkarisma, dan memiliki pengikut banyak pun dikunjungi oleh si calon (Subiyakto, 2011:42).

Karir politik kyai saat ini bukanlah hal yang baru. Keterlibatan kyai dalam permainan politik sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Jika pada zaman pra-kemerdekaan mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), lobi kultural dan perang melawan penjajah, maka, pasca-kemerdekaan mereka ingin terjun ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2019 yang lalu. Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para kyai yang *wira-wiri*

masuk dalam partai politik. Hal ini tentunya semakin menambah meriah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, kyai memiliki pengikut yang setia seperti *fans* dalam dunia infotainment. Setidaknya ada tiga periode pentas politik elite agama (kyai) dalam percaturan perpolitikan nasional. *Pertama*, adalah periode tahun 1945 sampai dengan periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkiprah secara relatif bebas dalam perpolitikan nasional. Dalam periode ini para elit agama (kyai) yang menjadi politisi yang selanjutnya disebut sebagai politisi Islam – bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia. *Kedua*, adalah masa-masa dimana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir semua potensi perlawanan dan pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama, biasanya dikenal dengan 32 tahun masa kejayaan Orde Baru antara tahun 1966 sampai dengan 1998. *Ketiga*, adalah periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai dengan kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara termasuk ekspresi politik para elit Islam. Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus (Purwoko, 2006).

Yang mendorong elite politik untuk memainkan peran aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis (senantiasa) ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan, atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan, dan karena individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elite dan kelompok kepada individu.

Aktualisasi strategi politik Kiai tidak jarang dilakukan baik secara pribadi atau pun melalui organisasi seperti NU dan Muhammadiyah atau partai politik. Kiprah politik Kiai secara perseorangan tidak lepas dari kewibawaan dan kemampuan memanfaatkan peluang serta meminimalkan berbagai kendala. Di samping itu kemampuan Kiai sebagai enterprenuer politik pada posisinya sebagai cultural broker, menghasilkan strategi politik Kiai yang aktualisasinya dapat diterima oleh umat. Penerimaan oleh umat menjadi faktor penting karena tanpanya dapat mereduksi kewibawaan yang dimiliki oleh Kiai tersebut (Subiyakto, 2011:46).

Orientasi politik Kiai sesungguhnya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Orientasi ini kemudian dikemas dalam kepentingan kekuasaan. Secara teoritis, kekuasaan adalah naluri manusia dalam perilaku politik yang tidak bisa diabaikan (Andrain, 1992:135). Retorika politik Kiai dalam menggunakan simbol-simbol agama perlu dibuktikan secara nyata dalam kerja-kerja politik yang lebih riil. Kiai juga lebih bisa berperan mencerdaskan umat melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi Kiai berpolitik adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, maka kerja Kiai lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkaran yang bisa dirasakan bagi umat. Sebab apabila bahasa simbol agama yang lebih dikedepankan tanpa kerja-kerja politik yang lebih riil, akan menciptakan suatu fanatisme berlebihan terhadap diri Kiai oleh umat.

Dengan demikian bahwasannya peneliti menemukan dua garis politik Kiai. *Pertama*, Kiai sebagai aktor. Artinya, kiai yang tergabung dalam beberapa parpol dan menjadi tim advokat calon kandidat. Kegiatannya adalah mengekspos calon kandidat kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Kiai juga berani mengajak pasangan calon yang didukung oleh mereka untuk bergabung dalam kegiatan sosial yang diadakan baik masyarakat maupun pesantren. *Kedua*, Kiai sebagai peserta. Artinya, mereka telah bergabung dengan beberapa partai politik dan mereka menjadi tim advokat. Namun, hanya secara implisit mereka meluncurkan kampanye untuk pasangan calon yang didukung oleh mereka. Mereka berpikir, sebenarnya masyarakat akan tahu dan mengikuti sendiri tentang pilihan politik Kiai. Tokoh-tokoh Kiai ini juga mendesak para anggota politik

untuk bergerak lebih dari diri mereka sendiri. Hal ini demi menjaga peran baik kiai sebagai pemuka agama. Namun, Kiai ini tidak mencari keuntungan pragmatisme. Mereka tentunya hanya menerima bantuan (kalau ada yang memberi) dari pasangan calon yang didukung oleh mereka.

Berbeda halnya dengan kyai yang bersifat netral, dimana mereka cenderung pasif untuk berpolitik dan beranggapan bahwa pemimpin yang terpilih adalah atas kehendak Yang Maha Kuasa Allah SWT. Kyai ini mampu meredam suasana setelah pemilihan yang terjadi. Dengan gejolak antar warga bahkan sampai memutus tali persaudaraan tidak diinginkan oleh para kyai. Salah satu cara untuk meredam suasa tersebut dengan menjelaskan dan memberi pengertian bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk membenci sesama dalam keadaan apapun melalui mimbar saat sholat Jum'at atau saat pengajian besar. Peran kyai seperti inilah yang tidak memikirkan dunia saja, namun akhirat juga sangat penting.

Berdasarkan literature review yang telah dilakukan oleh Peneliti, dalam hal ini pengaruh kyai di Desa Besito pada saat Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 memiliki pengaruh besar terhadap proses pemilihan yang dilakukan pemilih. Posisi dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana pengaruh tokoh agama dalam pilkades, dan terbukti setelah observasi lapangan yang telah dilakukan bahwa peneliti menemukan bahwa kyai berkoalisi dengan salah satu calon Kepala Desa dan bersaing antar kyai demi keuntungan pribadinya. Hal ini dikarenakan posisi tokoh agama di dalam Desa sangat penting guna menjalankan kebijakan-kebijakan yang nantinya dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Selain hal tersebut, studi penelitian ini jarang diteliti. Studi literatur yang sudah ada membahas pemilihan kepala desa dan tokoh agama hanya pada sampai lingkup pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan gubernur (pilgub). Untuk itu penulis ingin menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya dimana tidak banyak yang membahas pembelahan suara kyai dan implikasinya bagi dinamika sosial dan politik di masyarakat. Pembelahan suara kyai didasari oleh kepentingan politik yang merubah peran kyai yang sebelumnya hanya sebagai penceramah atau pendakwah kini menjadi sosok yang mempunyai kepentingan guna mempertahankan citra diri sebagai kyai terkenal dan berdampak pada kehidupan

sosial dan politik di masyarakat desa. Dimana penelitian ini hanya berfokus pada elit desa yaitu kyai dalam pemilihan kepala desa dan sosok kyai ini sangat diperhitungkan keberadaannya.

Ada dua momen penting yang sering kali mengundang perhatian publik, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dan Pemilihan Kepala Desa. Dua momen tersebut akan memperoleh porsi berbeda yang menguras pikiran dan emosi masyarakat. Pilkades dan Pilkada tidak hanya bersinggungan dengan perebutan untuk memperoleh kekuasaan, melainkan sudah berbicara tentang gengsi sosial, gengsi kelompok, reputasi personal dan gengsi keluarga. Tensi politik dan emosional lebih kuat dibandingkan dengan hajatan politik yang lain, semisal Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Gubernur. Maka segala cara akan digunakan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini membahas terkait Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Hal menarik yang akan dibahas yaitu tokoh agama (kyai). Peran tokoh agama menjadi menarik dilihat karena faktanya gerakan sosial yang berlangsung di Indonesia, memunculkan tokoh agama yang memobilisasi massa dalam beragam aktivitas. Studi kasus yang dilakukan di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mengambil topik Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019 dilandasi dengan adanya aktivitas Penulis yang bertempat tinggal di Desa Besito, yang nantinya hasil karya tesis ini akan memperkaya bagi pembacanya.

Fakta yang terjadi di Desa Besito, kyai memiliki peran dalam mengarahkan umatnya untuk mendorong suksesnya pemilihan kepala desa. Tidak sedikit kyai yang condong ke salah satu calon kandidat, dimana di desa Besito terdapat calon kandidat kepala desa yang berada dalam satu dusun/dukuh Kauman, yaitu Nur Khosim yang bertempat tinggal di sebelah utara dan Abdul Rozaq yang bertempat tinggal di sebelah selatan dusun/dukuh tersebut. Adanya kedua calon dalam lingkup satu dukuh/dusun inilah yang mengakibatkan suara dan dukungan dari masing-masing kyai terbelah menjadi 2 (dua) kubu yaitu kubu sebelah utara dan sebelah selatan. Kyai yang rumahnya di sebelah utara mendukung Nur Khosim seperti yang dikatakan Ma'rufin yang mendukung beliau. Sedangkan, kyai yang

rumahnya di sebelah selatan mendukung Abdul Rozaq. Di sisi lain, sebelah dusun/dukuh Kauman yaitu dukuh Besito Lor, dukuh Magangan, dukuh Getas Gading, dan dukuh Sambeng masih menjadi perebutan dari ketiga calon kepala desa (Nur Khosim, Abdul Rozaq dan Noor Cholis).

Terbaginya 2 (dua) kubu antara selatan dan utara mengakibatkan terbelahnya suara saat menjelang pemilihan kepala desa Besito. Sejumlah kyai dari kubu utara mendukung Nur Khosim seperti Ma'rufin, Muzaki Alwi, Kamal, sedangkan dukungan kyai untuk Abdul Rozaq kubu selatan datang dari Ali Mustofa, Faizin, Falikun, ditambah dengan kyai yang bersifat netral, diantaranya Hartono, Noor Huda, Syaroni, dan Moh. Aris, inilah yang mewarnai kontestasi pilkades pada tahun 2019. Terbelahnya suara kyai ini dengan salah satu faktornya yaitu kepala desa terpilih pada periode sebelumnya belum bisa mengelola desa dengan integritas dan profesional kerja yang baik. Sebagaimana Kepala Desa sebelumnya yaitu Nur Khosim belum bisa menghantarkan desa Besito menjadi lebih baik dengan alasan bahwa Nur Khosim memiliki track record pribadi yang kurang baik di mata masyarakat. Sebelum Nur Khosim menjabat, kepala desa Besito yaitu Abdul Rozaq. Abdul Rozaq adalah sosok yang baik di mata masyarakat namun, di saat kepemimpinannya membentuk kelompok tersendiri sehingga jika ada suatu permasalahan hanya dirundingkan didalam kelompok tersebut dan kelompok itu dimasukkan dalam sistem pemerintahan desa. Inilah yang menjadi dilema dalam memilih pemimpin yang mampu mengayomi dengan bersedia meluangkan waktunya demi masyarakat secara sukarela. Sementara calon kepala desa Noor Cholis yang belum pernah menjabat, berkeinginan membangun desa Besito yang mandiri dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa secara maksimal. Alhasil dalam pemilihan kepala desa Besito tahun 2019 dimenangkan oleh Noor Cholis sebagai calon kandidat baru.

Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh tokoh dalam sebuah desa sangat menentukan, apalagi tokoh tersebut menjadi panutan banyak orang atau minimal dihormati karena ide-ide, gagasan atau kharisma yang dimiliki. Dalam proses pemilihan kepala desa tentunya sangat dibutuhkan peran dan pengaruh dari tokoh agama dalam mengarahkan dan memilih calon pemimpin

desa yang tepat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat tokoh agama merupakan seseorang yang disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terjadi di dalam masyarakat, tokoh agama mampu mengubah cara pandang, sifat bahkan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Agama adalah refleksi atas wujud rohaniah yang ada pada diri manusia, dipandang mampu menjadi pedoman yang memberikan ketenangan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis untuk mendalami masalah ini dalam sebuah tesis berjudul “ *Pembelahan Suara Kyai Dalam Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019* ” dengan Studi kasus Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembelahan Suara Kyai dalam Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019 ?
2. Bagaimana implikasi pembelahan suara kyai terhadap dinamika politik di masyarakat dalam konteks Pemilihan Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa peran kyai dan pembelahan suara kyai dalam Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
2. Menganalisa impketerlibatan kyai di Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 yang terjadi di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu linguistik atau kebahasaan. Berkenaan dengan hal ini yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan

pembaca khususnya mengenai peran kyai dalam Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti, dapat menjadi bahasan informasi yang mampu dikembangkan ke berbagai aspek. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengetahui pengaruh kyai dalam masyarakat. Bagi tokoh agama, dapat menjadi langkah yang penting untuk dijadikan bahan perbandingan agar dapat meningkatkan pengaruh yang lebih luas di masyarakat umum.

1.5 Penelitian Terdahulu (Literature Review)

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya penelitian ini hanya dalam lingkup desa. Penelitian yang sudah ada hanya membahas kyai dan pemilihan umum ini sebatas lingkup pemilihan presiden (Haris & Dardum, 2021), anggota DPR pusat-daerah, pemilihan gubernur (Aji & Adnan, 2020), bupati atau walikota (Subiyakto, 2011; Husein, 2018). Hal inilah yang menjadi keunikan dalam penelitian. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk melihat fenomena masalah yang sedang terjadi. Berkaitan dengan pembelahan suara kyai dan pemilihan kepala desa serta dinamika yang terjadi di masyarakat. Salah satu manfaat dari sebuah penelitian adalah menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya atau yang sudah ada. Pembelahan suara kyai terjadi karena memiliki kepentingan pribadi dan memobilisasi massa dalam memenangkan kontestasi politik dalam hal ini waktu pemilihan kepala desa (Fadhilah, 2007).

Keterlibatan para kyai dalam politik praktis menjadi semacam katalisator (agen perubahan) yang mengubah percepatan demokratisasi di Indonesia, serta praktik pembelajaran politik dan pematangan umat Islam dalam politik. Dalam keterlibatannya dalam politik praktis, para kyai menggunakan berbagai macam model, ada yang condong ke salah satu

calon kandidat pemimpin, partai politik dan aktivitas politik. Tak hanya itu, ada juga yang melibatkan istri, anak, dan keluarga untuk bersama-sama terjun ke dunia politik (Hidayatullah & Sudarman, 2019). Ini yang menjadi kegelisahan masyarakat sebagai pemilih, dimana kyai dimanfaatkan guna mendulang perolehan suara dengan mengabaikan peran utamanya sebagai pembimbing umat dan mencegah segala upaya yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Gelombang demokratisasi yang berlangsung sejak keruntuhan rezim Orde Baru rupanya benar-benar membawa angin segar bagi munculnya beragam ekspresi politik Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya buku-buku terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit Islam yang terpanjang di toko-toko buku mengenai sejumlah topik keislaman. Situasi ini sebetulnya sudah mulai muncul sejak 1980an dan terus meningkat pada era 1990an dimana kelas menengah baru mulai terbentuk seiring dengan proses modernisasi yang dijalankan oleh negara. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyak aktor-aktor politik berorientasi Islam baik yang moderat maupun radikal memasuki arena politik. Dari kalangan Islam, dua aktor kunci yang harus disebut di era reformasi adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Amin Rais. Dua orang ini bersama dengan intelektual lain konsisten terus memperjuangkan gagasan-gagasan demokrasi yang bisa mendukung proses transisi, seperti ide hak-hak politik rakyat, pemilihan umum yang transparan, serta penghapusan dwi fungsi ABRI. Pandangan mereka merepresentasikan suatu orientasi kekuasaan yang demokratis ketimbang suatu tuntutan terbentuk negara Islam (Miftahussurur, 2011).

Secara universal, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka dan bebas, pola kehidupan politik yang kompetitif, dan memberi perlindungan terhadap kebebasan masyarakat. Jika demikian, tak ada satu pun bangsa atau masyarakat yang sempurna dalam hal praktik demokrasi. Membangun masyarakat yang demokratis bagi Indonesia merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Masyarakat Indonesia yang pluralis dan multikultural dengan

beragam suku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara. Membangun masyarakat didasari dengan pendidikan yang kuat, dimana melalui pendidikan dapat diharapkan merubah cara pandang masyarakat mengenai nasionalisme Indonesia (Rianto & Moad, 2016).

Pemilihan kepala desa sering dikaitkan dengan praktik pembagian uang kepada warga. Pemilih desa (klien) memaknai uang dari calon kepala desa dalam berbagai cara. Ada beberapa cara masyarakat (klien) memaknai uang yang diberikan oleh calon kepala desa (patron). Pertama, sebagian masyarakat memaknai uang yang diperoleh sebagai berkah. Kedua, sebagian orang mengartikan uang sebagai pengganti satu hari libur. Jadi, meski sehari orang tidak bekerja karena harus memilih, mereka tetap punya penghasilan. Beberapa warga masyarakat lainnya memaknai pemberian uang tersebut sebagai bentuk kesungguhan calon kepala desa untuk bersaing dalam pemilihan kepala desa. Sebagian warga memaknai uang tersebut sebagai uang rakyat yang telah diterima oleh para calon kepala desa, khususnya para calon petahana karena selama ini mereka memiliki keistimewaan berupa tanah bengkok. Beberapa anggota masyarakat juga berpendapat bahwa pembangunan desa terus berlanjut dan berlanjut untuk memperoleh jaminan hidup selain untuk mendapatkan uang (Suyono, Nugroho & Windyastuti, 2021).

Berbagai konflik horizontal di masyarakat khususnya di Desa Besito menitik beratkan pada permasalahan konflik yang secara sekilas ditengarai oleh praktik politik praktis dan pelaku politik di desa. Minimnya pendidikan politik dan mudah terprovokasinya masyarakat oleh kelompok-kelompok kepentingan banyak menyebabkan timbulnya berbagai situasi konflik di masyarakat. Selain potensi konflik karena pelaku politik diatas timbul juga permasalahan antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh pergesekan kebudayaan yang berkembang. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Desa Besito terjadi konflik yang menyebabkan rusaknya keharmonisan dan luntarnya paham pluralisme. Maka dengan demikian perlu dilakukan pendidikan yang mampu memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat dalam

menuju kesejahteraan di masyarakat Desa Besito. Hal ini perlu menjadi perhatian kalangan kiai agar tetap menjaga persatuan umat dan lebih fokus pada tujuan dalam politik Islam yaitu kemaslahatan ummat dan menangkal segala upaya yang dapat memecah belah persatuan bangsa (Azharghany, 2022).

Demi mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan dibutuhkan sosok yang menjadi panutan di desa, salah satunya tokoh agama (kyai). Kyai merupakan orang yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. Dengan demikian diharapkan dapat membimbing umat dan menjadi benteng moral dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan hadirnya sosok Kiai atau Ulama dalam panggung politik, diharapkan dunia politik menjadi lebih bermoral, mementingkan kepentingan rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Keterlibatan kiai tidak hanya pada kehidupan sosial masyarakat tetapi juga berpengaruh di kehidupan politik desa, dimana keterlibatan kiai dalam dunia politik sangat jelas. Peran politik yang dimainkan tidak diragukan lagi, hal ini terbukti dengan kegigihan kyai dalam memperjuangkan kebijakan yang mengarah pada keagamaan. Selain itu, peran kyai mampu meredam konflik yang terjadi setelah pemilihan kepala desa dengan memberikan pengertian kepada masyarakat (Mahadi, 2015).

Sebagaimana terlihat dari tinjauan literatur dari karya-karya terkait baru-baru ini, di sebagian besar penelitian serupa, tokoh agama (kyai) mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di masyarakat. Terbukti di desa Besito, kyai melakukan aktivitas politik dengan memberikan restu dan dukungan kepada setiap calon kepala desa. Salah satu aktivitas yang dilakukan yaitu menjalin komunikasi politik dan menggerakkan massa untuk mendukung calon yang dipilih kiai. Dengan adanya aktivitas politik yang dilakukan oleh kiai menimbulkan pembelahan suara dan menimbulkan konflik di desa. Berbeda dengan kiai yang bersifat netral yang hanya memberikan restu kepada semua calon kepala desa dan membebaskan

masyarakat untuk menentukan pilihan politik karena pemimpin yang terpilih merupakan pilihan atas kehendak Yang Maha Kuasa Allah SWT.

1.6 Kerangka Teori

Pada penelitian ini menggunakan kerangka teori yang terdiri dari beberapa konsep, yaitu 1) kyai dan pemilu, 2) sosiologi politik masyarakat santri pedesaan dan 3) kyai, politik dan fragmentasi sosial.

1.6.1 Kyai dan Pemilihan Umum

Kyai dan Pemilihan Umum sama seperti halnya dengan Agama dan Politik, dimana keduanya tak bisa dipisahkan dari elemen kehidupan masyarakat. Keberadaan kyai dan pemilihan umum saling melengkapi atas kekurangan masing-masing. Agama Islam tidak memisahkan antara urusan duniawi dan akhirat, karena Islam mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, menghormati orang lain, tanggung jawab, terbuka dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan nilai-nilai yang diajarkan agama kehadiran kyai diharapkan dapat memberikan warna, pemberi nasihat, serta menjadi teladan bagi moral masyarakat dan pemerintah (Mahadi, 2015).

Pemilihan umum merupakan keadaan dimana konstituen atau voters menentukan sebuah pilihan politiknya terhadap mereka yang akan menduduki suatu jabatan politik tertentu. Posisi atau kedudukan-kedudukan ini beragam jenisnya seperti presiden, perwakilan rakyat dengan berbagai macam tingkatan pemerintahan (Syafiie & Azhari, 2002). Menurut Anwar Arifin (2006), istilah pemilu dikenal di Indonesia dan diartikan sebagai bagian upaya dalam memberikan pengaruh pada masyarakat dengan cara persuasi (tanpa paksaan) melalaui aktivitas retorik, ikatan politik, interaksi dengan publik, *lobbying* serta berbagai aktivitas lainnya. Walaupun adanya propaganda dan agitasi pada negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia mendapatkan kecaman, akan tetapi pada masa kampanye

pemilu, perilaku tersebut banyak dipakai oleh para kontestan atau politikus selaku komunikator politik.

Berkenaan dengan kontestasi Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Besito disambut positif oleh para kyai, santri, dan masyarakat luas. Walaupun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat diantara mereka juga sering terjadi. Perbedaan pendapat ini diartikan sebagai perbedaan pandangan politik. Sama halnya dengan yang terjadi pada realita sosio-kultural di Desa Besito, masyarakat memiliki satu pemahaman yang mengakar yaitu *sendhika dhawuh*. Istilah ini dimaksudkan bahwa apapun yang dikatakan atau diajarkan oleh kyai maka masyarakat akan tetap mengikuti. Pemahaman tersebut sampai saat ini masih tetap ada dan menganggap bahwa hal ini tidak menyimpang, justru dianggap sebagai wujud *welas asih* dan penghormatan kepada terhadap kyainya.

Menurut Herbert Mc Closky (dalam Gatara, 2009), partisipasi politik adalah kegiatan secara sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan umum. Berdasarkan definisi partisipasi politik tersebut, terdapat hal-hal substansif yang berkenaan dengan partisipasi. Partisipasi politik di negara-negara demokrasi, umumnya dianggap bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat maka akan semakin baik. Semakin tinggi tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik, serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Hal itu menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan sebagai warga negara yang tidak menaruh perhatiannya terhadap masalah kenegaraan. Pada umumnya, partisipasi yang rendah juga dianggap sebagai legitimasi yang rendah pula (Gatara, 2009).

1.6.2 Sosiologi Politik Masyarakat Santri Pedesaan

Tradisi hubungan kyai-santri di daerah ada dua tipe: *Pertama*, pola *hubungan guru-murid* adalah hubungan yang terjalin antara kyai dan santri sebagaimana layaknya antara guru dengan murid dalam hubungan formal. *Kedua*, *pola hubungan bapak-anak*, yaitu pola hubungan yang terjalin antara kyai dengan santrinya sebagaimana layaknya antara bapak dengan anak. Dalam pandangan kyai, santri di samping sebagai anak didiknya juga dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Tindakan ini mendorong terbentuknya pola hubungan yang terjalin antar kyai dan santri sebagaimana layaknya hubungan antara bapak dan anak (pola paternalisme). Pola hubungan paternalisme yang terjalin antara kyai dengan santri di pesantren dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri kyai yang bersangkutan yang memandang santri sebagai amanat yang harus di didiknya sebagaimana anaknya sendiri. Sedangkan Faktor ekstern berasal dari tradisi orang tua santri yang menyerahkan anaknya kepada kyai secara langsung dan santri yang menganggap kyai sebagaimana orang tuanya sendiri di pesantren. Di samping itu juga dipengaruhi oleh adanya doktrin dari *Ta 'lim Muta 'alim* yang mengajarkan ketaatan santri kepada kyainya (Fadhilah, 2007). Ketaatan kepada kyainya merupakan salah satu cara santri untuk menghormati kyainya. Dalam tradisi pesantren, cara ini berjalan terus dan berkembang menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh santri. Kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang terus dilakukan santri sehingga berkembang menjadi pedoman dan pengatur perilaku santri sebagai suatu tata kelakuan yang berlaku di pesantren.

Menurut Fadhilah, beberapa tipologi dan orientasi aktivitas kyai pesantren di pedesaan, antara lain, 1) kyai pesantren tipe kyai kitab, 2) kyai pesantren tipe kyai spiritual (tarekat), 3) kyai pesantren tipe kyai hikmah, 4) kyai pesantren tipe kyai advokatif, 5) kyai pedesaan tipe politik. Berikut penjelasannya :

- (1) *Kyai Pesantren Tipe Kyai Kitab*, yaitu kyai pesantren yang berperan sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu agama melalui kajian terhadap kitab-kitab kuning (klasik). Tipe kyai kitab pada dasarnya merupakan peran yang melekat pada setiap kyai pesantren-sebab selain sebagai pengasuh, kyai pesantren juga merupakan guru yang mengajarkan kitab-kitab ilmu agama baik di dalam pesantren maupun di masyarakat.
- (2) *Kyai Pesantren Tipe Kyai Spiritual* (tarekat), kyai pesantren yang berperan sebagai mursyid (guru) dalam suatu jama'ah tarekat. Perannya dalam hal ini sebagai pembimbing jama'ahnya dalam memahami tarekat yang diikutinya agar terfokus kepada aktivitas mensucikan hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
- (3) *Kyai Pesantren Tipe Kyai Hikmah*, kyai pesantren yang memiliki kemampuan supranatural dan memberikan pelayanan pertolongan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengobatan alternatif, pemberian amalan zikir dan wiridan, serta do'a untuk keberkahan. Orientasi aktivitas kyai hikmah ini lebih mengarah kepada pelayanan sosial melalui pendekatan keagamaan untuk melakukan pengobatan tradisional atas dasar agama.
- (4) *Kyai Pesantren Tipe Kyai Advokatif*, kyai pesantren yang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mampu berperan secara langsung melakukan kontrol sosial kepada masyarakat sekitarnya.
- (5) *Kyai Pedesaan Tipe Politik*, kyai pesantren yang menjadi pengurus partai politik. Dalam pandangan tipe kyai politik, aktivitas politik hanya sebagai kendaraan untuk mengatur kehidupan di dunia, sedangkan urusan mengajar pesantren menyangkut kepentingan kehidupan dunia dan akhirat yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya.

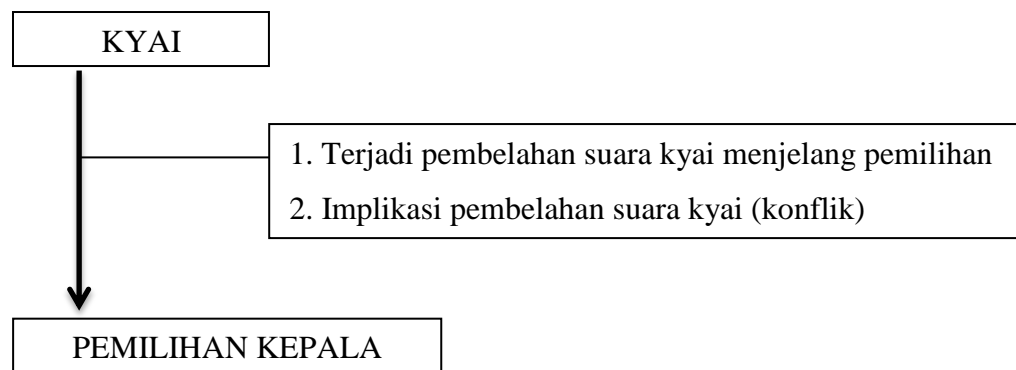
1.6.3 Kyai, Politik dan Fragmentasi Sosial

Arus gelombang demokratisasi yang terjadi mengeksplorasi lebih mendalam tentang politik Islam di Indonesia. Dengan menghubungkan dinamika dengan proses-proses historis dan konteks sosial-politik yang membentuknya, gambaran mengenai politik Islam sejauh ini tampak lebih kompleks. Sejak awal pergerakan nasional, gerakan politik Islam seperti yang tercermin dari Sarekat Islam (SI) terbentuk dalam konteks persaingan ekonomi dengan para pengusaha kapitalis Cina yang dikontrol oleh kolonial Belanda. Sampai kemudian motif ekonomis dari identitas politik Islam ini semakin bergeser ke arah tuntutan penegasan normatif Islam menjadi ideologi negara dan menimbulkan benturan antara kekuatan-kekuatan populis yang sudah ada. Pada masa Orde Baru, kekuatan ekonomi nasional kembali didominasi oleh para pengusaha (sebagian besar Cina) yang terkoneksi dengan Soeharto dan kroni-kroninya. Sementara itu kelompok-kelompok Islamis menderita peminggiran ekonomi dan politik di bawah rezim. Guna merebut sumberdaya ekonomi yang mungkin, kelompok-kelompok Islam moderat masuk ke dalam sistem birokrasi dan mengakses peluang bisnis yang ada sambil pada saat yang sama beraliansi dengan Soeharto dan elit Orde Baru yang korup. Hasilnya adalah suatu kelas menengah Islam baru yang menjadi kekuatan sosial bagi amunisi gerakan reformasi, namun mereka tetap tak terpisahkan dari elit Orde Baru, dan setelah itu menduduki posisi strategis dalam pemerintahan (Miftahussurur, 2011).

Sebagaimana tergambar dalam uraian di atas, sepanjang sejarah Indonesia dan khususnya setelah reformasi, kekuatan politik Islam semakin terfragmentasi secara tajam. Fragmentasi ini tampaknya lebih disebabkan oleh kepentingan elit masing-masing kelompok tersebut ketimbang atas dasar perbedaan ideologi. Hal ini menyebabkan kekuatan politik Islam tidak pernah benar-benar bulat apalagi jika hendak memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat. Adapun perjuangan atas identitas Islam dalam wujud penegakan syariat adalah upaya yang bersifat artifisial saja ketimbang

menyentuh isu ekonomi dan kebutuhan mendasar umat. Hasilnya, keberhasilan politik Islam dalam melakukan transformasi sosial, ekonomi dan politik selalu digagalkan sendiri oleh watak elitis dari arus politik Islam utama.

Kerangka Berfikir/Pemikiran



1.7 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep utama yang digunakan, yaitu :

a) Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah sebuah keadaan dimana konstituen atau *voters* menentukan sebuah pilihan politiknya terhadap mereka yang akan menduduki suatu jabatan politik tertentu. Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa yang akan memimpin selama 1 periode jabatan. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan terjadi aktivitas politik, ikatan politik, interaksi dengan publik, lobbying serta berbagai aktivitas lainnya.

b) Kyai

Kyai adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam dan keberadaannya sangat dihormati orang lain karena ilmu, sifat dan tingkah lakunya yang dijadikan panutan di mata masyarakat. Sebutan kyai muncul disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu :

i. **Kyai Tradisional**

Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang mendalami dan menguasai agama Islam karena mempunyai darah keturunan atau silsilah keluarga.

ii. **Kyai Modern**

Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang mendalami dan menguasai agama Islam karena adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

c) Pembelahan Suara

Pembelahan suara yang dimaksud ketika menjelang Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019. Pembelahan suara dalam penelitian ini menempatkan kyai sebagai aktor utama. Selain itu, pembelahan suara dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat pun tidak luput dari jangkauan dalam penelitian ini.

d) Dinamika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa

Dinamika politik yang terjadi dimana kyai yang ada di Desa Besito sewaktu Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 terpecah belah bahkan beberapa kyai masuk menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa. Masyarakat desa yang menjadi pengikut kyai berkubu maupun tidak berkubu (kyai netral) ikut terpecah belah akibat dari aktivitas politik yang dilakukan oleh kyai. Salah satu akibat dari pembelahan suara kyai yaitu hubungan antar tetangga kurang harmonis. Kehidupan masyarakat di desa Besito terbagi bagi ke dalam beberapa kelompok setelah pemilihan kepala desa.

Dari berbagai konsep diatas peneliti menggunakan beberapa fenomena beserta indikator penelitian sebagai berikut :

a) Pembelahan Suara Kyai

i. **Aktor yang terlibat**

Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019 melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Elemen masyarakat desa

yang terlibat, diantaranya calon kepala desa itu sendiri, tokoh agama (kyai), tokoh masyarakat (pengusaha), tokoh pendidikan (guru) dan organisasi kepemudaan desa (karang taruna) serta masyarakat desa. Dalam penelitian ini memposisikan kyai sebagai aktor utama, dimana posisi kyai sangat sentral di masyarakat.

ii. Isu – isu saat Menjelang Pemilihan Kepala Desa

Dalam Pemilihan kepala desa sangat rentan terjadinya konflik horisontal, karena masyarakat akan terbelah menjadi kelompok-kelompok pendukung dari calon kepala desa, dan masing-masing pendukung akan berusaha keras untuk dapat memenangkan calon kepala desa yang didukungnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik horisontal, yaitu : perbedaan kepentingan yang sama kuat antar pendukungnya dan penggunaan isu-isu yang mendeskreditkan calon kepala desa yang lain.

b) Implikasi Pembelahan Suara Kyai

Pemilihan Kepala Desa Besito tahun 2019 menimbulkan fragmentasi sosial di dalam masyarakat, diantaranya : persaingan antar kyai dan pendukungnya. Kondisi desa sebelum Pemilihan Kepala Desa Besito kehidupan masyarakat desa yang aman, tentram, damai berubah menjadi tidak kondusif setelah Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019 terjadi. Artinya, kehidupan masyarakat yang semula saling menyapa, berbincang-bincang bersama di warung berubah menjadi tidak saling menyapa, berbincang-bincang bersama tetap ada akan tetapi dengan sesama pendukung calon kepala desa.

1.8 Metode Penelitian

a. Tipe dan Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berimplikasi pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten, artinya dalam pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menyimpulkan data tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Selanjutnya, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting* (Creswell, 2010).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Melalui penelitian studi kasus diharapkan peneliti dapat menyelidiki secara cermat suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang obyektif dan mendalam tentang fokus penelitian. Pendekatan studi kasus dipilih karena permasalahan yang dijadikan fokus penelitian ini hanya terjadi ditempat tertentu yaitu di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Pada penelitian lapangan yang melalui pendekatan kualitatif ini sumber informasi peneliti dilakukan terjun secara langsung *qualitative observation* yakni ke Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, *face-to-face interview* dengan kyai yang berada di Desa Besito. Kyai yang dimaksud adalah kyai yang mempunyai pondok pesantren atau yang memiliki kharismatik dan pengaruh yang luar biasa. Segala yang terjadi di Desa Besito saat menjelang pemilihan kepala desa tahun 2019 yang mengakibatkan suara kyai terbelah dan membentuk kelompok-kelompok kepentingan.

b. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini mengambil sumber data, diantaranya :

1. Sumber Data Primer

Data primer diambil sebagai sumber data utama dalam penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data observasi langsung. Adapun wawancara sebagai sumber primer meliputi wawancara terhadap tokoh agama (kyai), tokoh masyarakat (pengusaha, perangkat desa), tokoh pendidikan (guru) dan organisasi kepemudaan desa (karang taruna) serta masyarakat desa.

2. Sumber Data Sekunder

Data ini diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, kitab-kitab, yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu guna sebagai data pendukung serta penguat untuk data primer.

c. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa alat bantu untuk mendukung keakuratan data dan perekam memori yang akan diperoleh oleh peneliti. Alat bantu tersebut berupa fotografi kamera, internet, dokumen, serta tape-record.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Random Sampling : khusus untuk perwakilan informan dari masyarakat desa Besito, diambil secara *Random Sample* karena semua itu sudah bisa mewakili data yang dibutuhkan penulis.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengambilan data melalui dokumen-dokumen atau data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik berbentuk catatan, buku, foto, arsip-arsip, dan lain-lain.

e. Teknik Analisis Data

Selain beberapa point yang telah disajikan diatas, sebuah karya tulis juga memerlukan teknik analisis data, untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menjadi data yang tersusun secara teratur. Data primer dan sekunder yang sudah didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Setelah semua data terkumpul, digunakan metode deskriptif analitik. Hal ini bermaksud menggambarkan seluruh teori tentang peranan yang kemudian digunakan untuk menganalisis tentang peran kepala desa dalam pengembangan badan usaha milik desa.

Dari kajian data yang terdapat banyak gambaran-gambaran umum mengenai penelitian ini kemudian dikerucutkan dengan kajian teori yang menghasilkan pada kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun langkah dalam analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model John W. Creswell dengan empat alur kegiatan, yaitu :

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat semua hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan tentang pengaruh kyai secara menyeluruh yang kemudian melakukan reduksi data dengan cara memilih pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan mentransformasikan data global dari lapangan.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dapat dilakukan dengan menampilkan data berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan kyai dan

masyarakat mengenai topik penelitian. Selanjutnya, peneliti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan dilapangan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah apabila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Ketiga langkah tersebut saling mempengaruhi. Pertama yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian perbandingan dengan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini karena data-data yang didapatkan berdasarakan hasil analisis dari beberapa buku dan dokumen-dokumen lain, maka peneliti perlu mengelompokkan, mengambil data yang penting dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga data yang tidak penting dapat dibuang. Peneliti akan mereduksi data untuk dilakukan penyajian data. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti memiliki sistematika pembahasan sebagai bagian untuk mengelompokkan beberapa bab pokok. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi berisikan tentang latar belakang masalah mengapa studi ini perlu dikaji, masalah penelitian yang membahas mengenai pokok permasalahan utama dalam penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai tujuan penelitian yang akan dilakukan, signifikansi penelitian, kajian literatur yang menjelaskan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, kerangka teori, model analisis, hipotesis, operasionalisasi konsep, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, keterbatasan penelitian dan

sistematika penulisan. Pada bab I secara khusus menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam rangka memberi kerangka awal mengenai penelitian yang akan dilakukan dan data awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis selanjutnya.

BAB II Memaparkan Kondisi Di Lapangan Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yaitu membahas mengenai beberapa sub bab seperti gambaran umum Desa Besito; gambaran ekonomi; sosial dan masyarakat Desa Besito; serta deskripsi responden.

BAB III Pembelahan Suara Kyai Dan Implikasinya Dalam Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019 Peneliti berusaha menyajikan apa yang didapatkan selama proses penelitian (wawancara) yang menggunakan teknik *random sampling* dengan tujuan memperoleh hasil yang diinginkan oleh Peneliti.

BAB IV Analisis Pembahasan dengan menyajikan pembelahan suara kyai dan implikasi yang terjadi menjelang serta sesudah pemilihan kepala desa Besito.

BAB V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan pada penelitian, temuan penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan dan hipotesis penelitian, implikasi teori yang digunakan dalam penelitian, serta implikasi penelitian secara empiris dalam kajian Pembelahan Suara Kyai di Pemilihan Kepala Desa dengan Studi Kasus Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.